

POTRET PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI GURU DI DAERAH PERBATASAN KABUPATEN SANGGAU

(POTRAIT OF EDUCATION AND TEACHER COMPETENCE IN BORDER AREA SANGGAU REGENCY)

Samion¹, Yudi Darma²

¹ Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan IKIP PGRI Pontianak' Jl. Ampera No. 88
Pontianak

² Program Studi Pendidikan Matematika IKIP PGRI Pontianak, Jl. Ampera No. 88 Pontianak
²e-mail: yudidarmamtk@gmail.com

Dikirim : 3 Maret 2016, Diterima setelah perbaikan : 16 Mei 2016

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian terhadap kebutuhan dan kompetensi guru serta perkembangan pendidikan daerah perbatasan di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat sebagai alternatif pemecahan masalah untuk sarana memberikan solusi sebagai pijakan dalam revitalisasi pemerataan pendidikan di daerah perbatasan. Data untuk penelitian ini diperoleh dari Cabang Dinas Pendidikan dan Olahraga, guru dan informan terkait. Teknik yang digunakan untuk pengambilan data adalah teknik survai dan wawancara. Alat pengumpul data terdiri dari metode dokumentasi, angket dan pedoman wawancara untuk menghimpun informasi yang bersifat kualitatif dari sumber data. Data diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah kebutuhan dan kompetensi guru dalam perkembangannya serta faktor-faktor penghambat dalam pendidikan berdasarkan dalam pelaksanaannya. Temuan studi ini menunjukkan bahwa urgensi pengelolaan serta perhatian, kebijakan dan pelaksanaan pemerintah untuk pembangunan Sumber Daya Manusia Entikong melalui sektor pendidikan sangat dibutuhkan. Rekapitulasi diperoleh bahwa relevansi guru di daerah perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau masih belum proporsional dan relevan, dan mesti dilakukan pembinaan yang secara berkala, terjadwal dan intensif untuk meningkatkan setiap lini kompetensi guru, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial oleh dinas pendidikan setempat. Oleh karenanya agar cabdikpora melakukan pembinaan yang komprehensif, peningkatan koordinasi baik antar sesama pengelola pendidikan di Kecamatan dan Kabupaten serta satuan pendidikan dan tenaga pendidik, meningkatkan akses dalam memberikan informasi, melakukan evaluasi pendataan secara berkala untuk kepentingan administrasi serta rekapitulasi pendataan kelengkapan pelaksanaan pembelajaran, sebagai sarana monitoring dan evaluasi untuk parameter keberhasilan program pendidikan dan dalam pengambil kebijakan sebagai tindak lanjut. Berperan serta dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengadaan secara bertahap terkait dengan kelengkapan penunjang pelaksanaan pembelajaran (alat laboratorium, teknologi, sumber pembelajaran, media pembelajaran, dan sebagainya), meningkatkan mutu pelayanan terhadap pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta mempersiapkan dan menempatkan tenaga guru yang sesuai dengan kompetensinya.

Kata Kunci: wilayah perbatasan, pendidikan, kompetensi guru.

ABSTRACT

This study intends to conduct a study on the needs and competencies of teachers and border area development of education in District Entikong Sanggau West Borneo as an alternative means of problem solving to provide solutions as a foothold in the revitalization of educational equity in the border area. Data for this study were obtained from Cabdikpora, teachers and informants related. The techniques used for data collection was a survey and interview techniques. Data collection tool consists of methods of documentation, questionnaires and interview guides to collect qualitative information from the data source. The data were processed using descriptive analytic method. Issues raised in this study is the need and competence of teachers in the development and inhibiting factors in education based on the implementation. The findings of this study suggest that the urgency and attention management, and implementation of government policies for the development of human resources through education Entikong is needed. Collection is shows that the relevance of the teacher in the District border area Entikong still not proportionate and relevant, and should be done regularly coaching, and intensive scheduled to increase each line competency of teachers, both pedagogic competence, personality, professional, and socially by the local education office. Therefore, in order to provide guidance cabdikpora a comprehensive, well improved coordination between the members and managers of education in the district and the district education units and educators, improve access to information, to evaluate the data collection on a regular basis for the benefit of the administration and implementation of the completeness of data collection of learning, as a means of monitoring and evaluation for the parameters of the program's success in education and policy makers as a follow-up . Participate in the provision of facilities and infrastructure in procuring gradually related to the completeness of supporting the implementation of learning (laboratory equipment, technology, learning resources, instructional media, and so on), improve quality of service for the management, monitoring and evaluation as well as preparing and placing teachers who according to its competence.

Keywords: *border regions, education, teacher competence*

PENDAHULUAN

Daerah perbatasan saat ini memasuki perspektif dalam pengembangan wilayah. Sebagai wilayah terdepan (perbatasan) yang muncul akibat globalisasi maupun desentralisasi kebijakan, terjadi pergeseran paradigma menuju kesejahteraan dan juga beranjak dari kuantitas menuju kualitas. Karakteristik yang berbeda dengan wilayah lain bahwa Entikong merupakan wilayah perbatasan dengan aktivitas migrasi yang sangat tinggi. Walaupun merupakan daerah terdepan yang merupakan jendela antar negara, pembangunan melalui sektor

pendidikan di daerah tersebut masih perlu mendapat perhatian dan prioritas dari pemerintah, hal tersebut ditunjukkan dengan belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai, pemerataan guru yang masih belum relevan sehingga juga membutuhkan pengelolaan yang optimal dan profesional.

Rancangan pembangunan manusia yang sesungguhnya adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Hal ini berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia memperkenalkan

konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahapan pembangunan.

Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan. Untuk mengukur kualitas manusia dapat dilihat dari capaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM terdiri dari 3 komponen yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Kualitas Hidup Layak.

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, sifatnya mutlak dalam kehidupan, baik dalam kehidupan seseorang, keluarga, maupun bangsa dan negara. Maju-mundur atau naik-turunnya kualitas suatu bangsa tentunya ditentukan oleh kualitas pendidikan bangsa tersebut. Mengingat sangat pentingnya bagi kehidupan, maka pendidikan harus dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Untuk melaksanakan pendidikan harus dimulai dengan pengadaan tenaga pendidikan sampai pada usaha peningkatan mutu tenaga kependidikan. Kemampuan guru sebagai tenaga kependidikan, baik secara keilmuan, personal (kepribadian), sosial, maupun profesional, harus benar-benar dipikirkan karena pada dasarnya guru sebagai tenaga kependidikan merupakan tenaga lapangan yang langsung melaksanakan kependidikan dan sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan. Untuk itu, ilmu pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan merupakan ilmu yang mempersiapkan tenaga kependidikan yang profesional.

Pendidikan adalah salah satu investasi pengembangan terbaik. Pendidikan merupakan hal penting untuk pencapaian semua *Millenium Development Goals* (MDGs) dan hasil pembangunan lainnya. Pendidikan memungkinkan orang untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat,

meningkatkan akses ke pekerjaan dan sumber pendapatan lain dan membuka peluang. Pendidikan juga memberikan manfaat dalam kesehatan, pemerintahan, produktivitas, kesetaraan gender dan pembangunan bangsa. Upaya pemerintah terhadap tenaga guru sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai bentuk kebijakan. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen merupakan dasar kebijakan untuk memperkuat eksistensi tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, merupakan program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2/1989. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata. Tidak relevan bila di zaman modern ini masih ada anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah dan ada pula yang masih buta huruf. Oleh karena itu, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang pendidikan dasar. Untuk merealisasikan tujuan tersebut memerlukan kerja sama yang kooperatif antara Pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Wilayah perbatasan menjadi daerah yang belum tersentuh oleh dinamika pembangunan dan pusat-pusat pelayanan pemerintah lainnya yang menyebabkan masyarakat menjadi relatif miskin dan tertinggal, sehingga secara ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan ini lebih berorientasi kepada negara tetangga Malaysia yang terus membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi disepanjang koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang lebih memberikan keuntungan bagi masyarakat. Dari aspek politik dan sosial budaya, masyarakat di wilayah perbatasan lebih cenderung berorientasi pada negara tetangga,

karena rendahnya akses informasi dan komunikasi yang mereka peroleh sehari-hari.

Pembangunan pendidikan dibedakan dalam dua kerangka arah kebijakan, yaitu kerangka anggaran dan kerangka regulasi: a) meningkatkan Relevansi Pendidikan dengan keperluan Pembangunan agar lebih sesuai dengan keperluan pembangunan daerah dan pembangunan nasional secara umum; b) menyeimbangkan dan menyetarakan jumlah dan jenis program studi pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja; c) meningkatkan intensitas pendidikan nonformal dalam rangka mendukung upaya penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja termasuk dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pelayanan pendidikan formal.

Laju perkembangan teknologi dan informasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berimbas positif pada kehidupan dan kesejahteraan guru di Indonesia. Perhatian pemerintah dengan program remonerasi dan sertifikasi guru dan dosen menunjukkan betapa pemerintah mengupayakan perbaikan nasib guru khususnya. Namun upaya menuntut adanya perimbangan dengan peningkatan kompetensi agar proses pembelajaran menghasilkan luaran yang bermutu. Arus teknologi yang mewarnai proses belajar mengajar membawa peserta didik pada berpikir kritis, dan belajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Fenomena ini tidak dapat dibendung, oleh karena itu siswa membutuhkan seorang guru yang benar-benar mampu memfasilitasi mereka dalam proses pembelajaran. Tuntutan ini seyogyanya mampu menghadirkan sosok guru ideal yang siap mendampingi peserta didik menembus laju teknologi.

Guru berkualitas selalu menjadi tuntutan diberbagai jenjang dan jenis institusi pendidikan, baik institusi penghasil (LPTK) maupun institusi pengguna (sekolah). Tugas tenaga pendidik (guru) kapan dan dimanapun selalu sangat berat, ia

harus memiliki sejumlah kompetensi akademi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Tantangan ini merupakan PR (pekerjaan rumah) guru yang harus cepat dan benar-benar dikerjakan dengan tanggung jawab penuh. Jika di era globalisasi ini guru tidak akrab dengan teknologi (adaptif), sekurang-kurangnya ia mampu melakukan komunikasi ilmiah dengan bantuan perangkat lunak. Namun pada kenyataannya kemampuan yang dimiliki siswa lebih baik. Bagaimana seseorang guru dapat tampil prima dalam proses pembelajaran jika gurunya sendiri tidak mengikuti perkembangan dunia pendidikan.

Dalam laju proses pembelajaran di sekolah siswa seringkali mengidolakan gurunya sebagai sosok yang serba bisa. Tuntutan tersebut esensinya merupakan sanjungan untuk para guru merebut perhatian siswa dengan menampilkan sosok yang memiliki karakter ideal, cerdas, sabar, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekolah dan masyarakat. Seirama dengan terjadinya perubahan kurikulum pendidikan nasional (kurikulum 2013) berdampak pula pada tanggung jawab dan kinerja guru. Guru dituntut untuk cepat merespon dan melakukan upaya pembaharuan dengan melakukan inovasi dan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan ilmu serta teknologi.

Salah satu yang dapat dilakukan guru agar dalam proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan, maka guru harus meningkatkan kemampuan akademiknya serta selalu merespon perkembangan ilmu pengetahuan. Cara mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang konvensional sudah seharusnya diubah dengan melakukan pendekatan atau strategi pembelajaran yang memadukan berbagai metode sesuai dengan pokok materi, yang intinya melibatkan siswa untuk berpikir kritis.

Kompetensi guru juga merupakan *key of priority* terhadap kualitas pendidikan, karena garda terdepan dalam mempersiapkan generasi penerus adalah guru. Oleh

karenanya, guru dituntut memiliki kompetensi yang mesti dimilikinya, yaitu: 1) Kompetensi Pedagogik yang terkait dengan Kemampuan Mengelola Pembelajaran, merancang dan melaksanakan pembelajaran, memberikan evaluasi hasil belajar serta kemampuan pengembangan peserta didik; 2) Kompetensi Kepribadian yang terkait sikap yang baik, mampu memberikan keteladanan dan kemampuan kedisiplinan; 3) Kompetensi Profesional yang terkait kemampuan penguasaan dan pemahaman materi, mengelola proses pembelajaran dan mengelola kelas serta penguasaan media pembelajaran; 4) Kompetensi Sosial yang terkait kemampuan berkomunikasi dan kerjasama, pengetahuan agama, budaya dan adat istiadat.

Atas dasar inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk menelaah terkait kompetensi guru dan perkembangan pendidikan dalam pelaksanaan program pendidikan serta faktor-faktor penghambatnya pada sektor tenaga pendidik sebagai pengemban amanat dalam melaksanakan pendidikan formal untuk mencapai tujuan nasional di daerah perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mutu (kompetensi) guru di daerah perbatasan dan relevansinya dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam konteks akademik maupun sebagai masukan bagi pemegang kebijakan.

Menghadapi persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan yang beragam mulai dari kebutuhan, kompetensi guru, pemerataan pendidikan dan relevansi pendidikan yang diharapkan pada era global saat ini. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah guru-guru di daerah perbatasan Kecamatan Entikong sudah relevan dengan peta kebutuhan pendidikan?; 2) Bagaimanakah kompetensi guru dalam pelaksanaannya mengelola, merancang, dan melaksanakan pembelajaran dalam pengembangan peserta didik di Kecamatan

Entikong?; 3) Bagaimana ketersediaan media pembelajaran dan kesesuaian penggunaannya oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran di Kecamatan Entikong serta faktor pendukung dan kendala yang ada di daerah perbatasan Kecamatan Entikong?

KAJIAN LITERATUR

Wilayah Perbatasan

Konsep yuridis Romawi mengenai wilayah perbatasan, sesuai dengan isu yang berkembang pada saat itu sudah mencirikan adanya penetapan wilayah dan konsep kerjasama sesuai dengan peraturan dan pemerintahan yang berkuasa. Konsep kerjasama dan penetapan batas ditentukan oleh kedua pihak yang bertetangga seperti yang diketahui dari definisi perbatasan adalah "*a definition of the border; a method of setting, delimiting and marking it; the papers drawn up by the neighbouring states stipulating the border line; the manner the state referred to regards the issue of bilateral border regime; the internal legislation regarding the border juridical regime*" (Aelenei, 2001: 112).

Dalam perkembangannya, perbatasan tersebut dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang meliputi:

1. Mengelola dan mengawasi territorial *status quo*;
2. Mengawasi territorial kekuasaan dengan peraturan yang dipengaruhi wilayah lainnya.

Pengertian *border* seringkali diartikan sebagai batas dari teritorial politik dan ruang tempat tinggal. Pada beberapa kasus, *border* memiliki arti yang lebih luas bagi kondisi politik dan ekonomi geografis dengan kasus tertentu untuk membagi kekuasaan atas wilayah yang berbatasan (Guo, 2005: 5). *Border area* atau dengan sinonim yang sama yaitu *cross-border area* secara luas berkaitan dengan heterogenitas spasial dalam istilah struktur ekonomi dan politik dengan terdiri atas dua atau lebih kekuasaan.

Berkaitan dengan perwujudan fisik batas wilayah perbatasan, menurut Guo (2005), batas wilayah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan:

1. *Natural Border*, yaitu wilayah dibatasi oleh batas alam seperti gunung, sungai, danau, laut, pantai, atau selat. Karena urgensinya terhadap kepentingan pertahanan batas tersebut seringkali dianggap sebagai batas politik.
2. *Artificial Border*, yaitu batas wilayah yang dapat terdiri dari batas buatan (batu,

dinding), batas geometris (menggunakan batas koordinat bumi), dan batas *cultural*/budaya (perbedaan budaya, etnis, ideologi).

Secara spesifik wilayah perbatasan itu menjadi eksis apabila unit politik (pemerintahan antar kedua wilayah) terbentuk, batas tersebut membagi dua sistem otoritas politik. Fungsi perbatasan tersebut dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Fungsi Kawasan Perbatasan

| Guo (2005) | Van Well (2006) |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai fungsi <i>legal</i>, dimana garis perbatasan membagi wilayah secara formal dalam kewenangan negara; 2. Sebagai fungsi <i>kontrol</i> dimana tercatatnya setiap kegiatan di perbatasan sebagai kontrol pemerintah; 3. Sebagai fungsi <i>fiscal</i>, berkaitan dengan fungsi keuangan pada sebuah negara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai <i>barrier</i>/pembatas, yaitu 2. membagi secara jelas mengenai aspek ekonomi, administrasi, hukum, kebudayaan dan psikologi; 3. Sebagai <i>jembatan</i>, fungsinya adalah menjembatani sebuah program/ jaringan strategis, peningkatan kapasitas; 4. Batas sumber daya (<i>resources</i>), yaitu adanya kesempatan ekonomi dan politis dalam pemanfaatan sumber daya di kedua wilayah; 5. Sebagai simbol <i>identitas</i>, lambang identitas suatu wilayah/bangsa/negara. |

Sumber: Guo (2005); Van Well (2006)

Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan ini diharapkan dapat memberikan prinsip-prinsip pengembangan wilayah Perbatasan Negara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya untuk mengejar ketertinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga. Selain itu, kebijakan dan strategi ini nantinya juga ditujukan untuk meningkatkan wilayah Perbatasan Negara dari sektor pendidikan melalui evaluasi sumber daya manusia yang akan dijadikan model perencanaan dalam pelaksanaan pendidikan, baik yang dilakukan oleh guru, masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan daerah, sehingga kegiatan

pendidikan dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal.

Wilayah perbatasan seringkali didefinisikan sebagai *periphery* dari sebuah negara. Model yang dimodifikasi oleh Prescott (1987) menunjukkan perbedaan yang jelas antara pusat negara dengan pusat provinsi dimana keduanya berperan dan terkait dengan wilayah perbatasan. Khususnya wilayah perbatasan, dapat berperan penting dalam kebijakan lebih luas.

Meningkatnya pergerakan manusia di kawasan perbatasan menyebabkan implikasi di berbagai bidang, antara lain: 1) mengubah sifat/*nature* dari hubungan internasional yang terbentuk (terjadinya pergerakan manusia di kawasan perbatasan dapat

mendorong pembangunan regional diantara negara yang relatif lebih maju dan membentuk kesempatan kerjasama), 2) adanya kecenderungan pemerintah lokal tidak mampu membentuk kerjasama internasional dalam menangani permasalahannya, sehingga potensi konflik cenderung terjadi akibat perbedaan perspektif dan interest (Akaha dan Vassilieva, 2005:3). Kedua kemungkinan tersebut dapat terjadi seiring dengan kebijakan yang melandasi hubungan kedua wilayah yang berbatasan.

Perubahan kondisi hubungan di perbatasan menyebabkan terjadinya pergerakan arus manusia antarnegara. Hal ini menjadi perhatian penting dalam hubungan internasional, karena terjadinya migrasi di wilayah perbatasan disebabkan oleh motif peningkatan kesempatan ekonomi antara perusahaan dan individual. Kondisi tersebut berdampak pada perluasan jaringan sosial antara negara yang berbeda, sehingga membentuk komunitas transnasional dengan ciri etnis dan warisan budaya yang sama, namun hidup dalam negara yang berbeda (Akaha dan Vassilieva, 2005: 1).

Wilayah Perbatasan Entikong

Panjang wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia) sekitar 1200 km. Panjang garis perbatasan tersebut sebesar 70,58% berada di Provinsi Kalimantan Barat (847,3 km), serta melintasi lima daerah kabupaten yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu yang meliputi 14 daerah kecamatan.

Pada kawasan perbatasan Kalimantan Barat telah ditetapkan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi yang pertama (Entikong–Tebedu) di Kabupaten Sanggau yang dibangun pada tahun 1991 dan yang kedua dibangun di Nanga Badau–Lubuk Antu yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu. PPLB itu merupakan bagian dari enam PPLB yang telah disepakati dengan pihak Sarawak untuk dibuka di perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak (Paloh, Sajingan

Besar, Jagoibabang, Entikong, Jasa Karangas Kagau, dan Nanga Badau).

Selain PPLB tersebut, terdapat pula pos lintas batas (PLB) yang tidak resmi, yaitu sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak. Hingga saat ini, yang telah disepakati kedua negara baru 10 buah desa di Kalimantan Barat dan 7 kampung lainnya di Sarawak.

Kompetensi Guru

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang memuat tujuan negara antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Keadaan kehidupan bangsa Indonesia saat ini masih jauh dari cita-cita bangsa yang cerdas. Reformasi yang ditandai keterbukaan, jaminan kepastian hukum, demokrasi, hak asasi manusia masih jauh dari harapan.

Disinilah dituntut peran guru yang profesional untuk tampil melaksanakan tugasnya untuk membawa bangsa dan negara kearah yang lebih baik. Peserta didik yang nasionalis sejati diharapkan terbentuk dari guru guru profesional, peserta didik inilah yang nantinya akan memegang tongkat estafet kepemimpinan dimasa depan,yaitu pemimpin yang nasionalis yang mampu membawa bangsa dan negara duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju didunia ini.

Pengertian profesi menurut UU SISDIKNAS adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi, sedang profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan , keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia

3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugasnya
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerjanya
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan

Guru profesional adalah guru pada pendidikan anak usia dini sampai sekolah lanjutan tingkat atas harus memiliki kualifikasi akademik strata 1 atau program diploma empat, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kompetensi guru itu adalah meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain:

- a. Kompetensi Pedagogik, guru mempunyai kewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. Kompetensi Profesional, guru mempunyai kewajiban meningkatkan dan mengembangkan ngembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Kompetensi Kepribadian, guru berkewajiban memahami tingkat perkembangan siswa sehingga dapat bertindak obyektif dan tidak diskriminatif

terhadap peserta didik dalam pembelajaran atau melayani bimbingannya

- d. Kompetensi Sosial, guru mempunyai kewajiban memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa dan dapat menerapkan kerjasama dalam pekerjaan di lingkungan sosial, di sekolah maupun dalam masyarakat luas

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional, maka sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan tertentu. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel. Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini semua akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi (*evaluation research*) dengan bentuk survai. Analisis data primer dan skunder sebagai kelengkapan studi survai dalam penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Teknik dalam pengambilan sampel yaitu dengan *quota sampling*. Sampling kuota adalah bentuk dari sampel distratifikasikan secara proporsional, namun tidak dipilih secara acak melainkan secara kebetulan saja. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pengambilan sampel, yaitu:

- a. Sekolah yang ada di Kecamatan Entikong terlebih dahulu dikelompokkan sesuai klasifikasi (jenjang pendidikan) berdasarkan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok Sekolah Dasar (SD), Sekolah

- Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- b. Dari pengelompokan tersebut masing-masing setiap jenjang dipilih 3 (tiga) orang guru yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian (responden). Untuk jenjang SD dipilih 3 (tiga) orang Guru yang terdiri dari Guru Kelas 2, 5, dan 6;

jenjang SMP dipilih 3 (tiga) orang Guru yang terdiri dari perwakilan Guru yang mengajar di kelas 7, 8, dan 9; dan untuk jenjang SMK dipilih 3 (tiga) orang Guru yang terdiri dari perwakilan Guru yang mengajar di kelas 10, 11, dan 12. Adapun rincian sampel dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Sampel (Responden) Penelitian

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah Guru | Banyak Sekolah | Jumlah Sampel |
|---------------------|--------------------|-------------|----------------|---------------|
| 1 | SD | 3 | 18 | 54 |
| 2 | SMP | 3 | 4 | 12 |
| 3 | SMK | 3 | 2 | 6 |
| Total Sampel | | | | 72 |

Metode Pengumpulan Data

Metode dokumentasi

Budiyono (2003: 54) berpendapat bahwa “metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melihatnya dalam dokumen-dokumen yang telah ada”. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang direktori wilayah Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dan guru-guru yang sebagai tenaga pendidik aktif.

Metode angket

Metode Angket adalah cara pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada subyek penelitian, responden, atau sumber data dan jawabannya diberikan pula secara tertulis (Budiyono, 2003:47). Dalam penelitian ini, metode angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kebutuhan dan kompetensi guru-guru di Kecamatan Entikong.

Metode wawancara

Metode wawancara adalah cara mengumpulkan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan sampelnya.

Metode ini dilakukan dengan cara bercakap-cakap dengan sampel atau informan yang diarahkan pada masalah

tertentu. Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menghimpun informasi yang bersifat kualitatif dari sumber data yang diperoleh seperti kepala dinas atau kepala cabang dinas pendidikan.

Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh simpulan berdasarkan hasil yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, data yang terhimpun dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan prosentase secara tendensi sentral sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan utama dari studi survai yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan kompetensi guru di daerah perbatasan serta kebutuhan (relevansi) yang realitasnya adalah sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan produktifitas baik dari sudut pandang pengelola dan pemegang kebijakan, sarana prasarana serta tenaga pendidik yang berimplikasi pada kualitas pendidikan di daerah perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Adapun secara umum temuan yang diperoleh dapat dilihat pada masing-masing aspek sebagai berikut:

Kondisi Pendidikan di Pedalaman Entikong

Kecamatan Entikong tentunya perlu menjadi perhatian secara intensif, terutama perkembangan pendidikan di daerah Kecamatan Entikong, yang termasuk dalam kategori penduduk produktif jika ditinjau dari usia penduduk setempat yang sejatinya menjadi aset daerah dalam perkembangan dan kemajuan wilayah. Kondisi lain yang perlu diperhatikan adalah cukup tingginya jumlah pendatang atau transmigran yang masuk ke Kecamatan Entikong. Kecenderungan tersebut kemungkinan besar akan tetap terjadi dimasa depan, mengingat Kecamatan Entikong sebagai kawasan perbatasan yang strategis dengan luasan wilayah yang cukup luas berpotensi untuk menarik penduduk bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Satu diantara daerah pedalaman di Kecamatan Entikong yang langsung bersebelahan dengan Negara Malaysia

adalah Desa Suruh Tembawang dengan luas 148,82 KM², desa ini merupakan daerah yang dikategorikan daerah terpencil, karena hal tersebut diidentifikasi dari terbatasnya akses transportasi dan komunikasi. Untuk menuju lokasi desa tersebut memerlukan durasi waktu 4 (empat) jam perjalanan dengan jarak 42 KM (gambar 4.b) dari Kecamatan Entikong dan 187 KM dari Kabupaten Sanggau dan ditempuh melalui jalur sungai dalam keadaan normal, jika tidak normal (ditinjau dari keadaan cuaca) maka bisa sampai 6 (enam) bahkan 7 (tujuh) jam perjalanan. Hal tersebut dikarenakan keadaan sungai tersebut seperti arung jeram (riam) melewati bebatuan sehingga juga sangat ditentukan dengan keadaan alam (cuaca) setempat, sedangkan untuk komunikasi masih sulitnya signal yang dapat menjangkau sehingga mesti menuju tempat yang cukup tinggi jika hendak melakukan komunikasi, misalnya via telfon.



Gambar 2. Keberangkatan Menuju Desa Suruh Tembawang

Jalur satu-satunya adalah melalui sungai sekayam (gambar 2), sungai sekayam merupakan jalur penghubung antara desa suruh tembawang dengan kecamatan entikong dengan melalau 7 (tujuh) desa, diantaranya desa Sontas, Serangkang, Merau, Entabang, Mangkau, Pala Pasang, dan Suruh Engkadok. Untuk listrik, di daerah tersebut menggunakan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), dan hanya

berfungsi ketika di malam hari saja. Oleh sebab itu perlu kebijakan dari pemerintah untuk mengupayakan agar masuknya tenaga listrik dan pembangunan tower yang dalam kaitannya sebagai signal telepon/*handphone*, sehingga memberikan kelancaran dalam berkomunikasi dan menunjang masyarakat setempat untuk mengikuti perkembangan informasi.



Kondisi sekolah di Kecamatan Entikong yang masih jauh dari terpenuhinya sarana prasarana yang memadai, ruang kelas yang belum representatif serta gedung sekolah yang tidak layak huni (dari perspektif kesehatan), dan masih belum meratanya tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 3. Foto Bersama Siswa/i SDN 07 Mangkau

Kemudian, hal yang tentu menjadi perhatian pemerintah berkenaan dengan peningkatan kualitas pendidikan, karena mengingat beberapa permasalahan yang ada diantaranya masih ada sekolah yang dua Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), tentunya hal demikian perlu mengikuti aturan yang ditetapkan, karena akan berdampak pada peraturan secara administratif ketika sekolah tersebut mengajukan proses untuk diakreditasi. Selain itu mengenai kesejahteraan guru yang bertugas di lokasi tersebut, masih ada yang belum memperoleh tunjangan daerah terpencil, berdasarkan wawancara kami kepada guru setempat dan sekretaris cabang dinas pendidikan dan olahraga di Kecamatan Entikong yang diantaranya pada tahun 2013 hanya 28 guru yang memperoleh tunjangan guru terpencil, sedangkan sisanya (sebanyak 95 orang guru) tidak mendapatkannya, bahkan yang diperoleh masih belum sesuai dengan UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa tunjangan guru terpencil harus sebesar dengan satu kali gaji pokok untuk setiap bulannya.

Oleh sebab itu, mesti ada perhatian yang intensif dan menjadi skala prioritas oleh pemerintah berkenaan dengan hak-hak guru untuk memperoleh kesejahteraannya dan siswa agar mendapatkan pendidikan yang layak, seperti kelengkapan sarana, prasarana, media dan sebagainya (gambar 3). Karena mengingat mereka juga adalah bagian dari bangsa ini dan tentunya juga

menjadi harapan kemajuan bangsa di masa yang akan datang.

Relevansi Tenaga Pendidik

Pada bagian sebelumnya secara jelas diketahui bahwa guru yang memiliki kemampuan profesional penuh perlu memperoleh pendidikan S_1 , dan akan lebih baik hingga S_2 atau lebih, tetapi bukan S_2 akademik seperti yang sekarang dikenal (hanya sebatas ijazah saja), tetapi S_2 profesional yang mengutamakan kemampuan mengembangkan, melaksanakan, menilai, mengorganisir, dan memperbaharui program belajar mengajar atau dalam bahasa UU No. 14 Tahun 2005 S_{1+} dan D_{4+} . Guru dengan tingkat kemampuan profesional yang demikian akan selalu mampu mengembangkan dirinya untuk memenuhi tuntutan baru pembaharuan pendidikan seperti penerapan kurikulum 2013 yang menuntut profesionalisme guru dari berbagai aspek.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa relevansi guru di daerah perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau masih belum proporsional, hal ini terlihat bahwa masih ada diantaranya guru mata pelajaran tertentu yang tidak sesuai dengan kompetensi/disiplin/rumpun ilmunya. Artinya, kedepan perlu untuk pemerataan dan relevansi guru di daerah perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau terkait dengan kebutuhan guru agar pihak Cabang Dinas Pendidikan dan Olahraga

(Cabdikpora) Kecamatan Entikong berkoordinasi dengan pemangku dan pengambil kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, yang disesuaikan dengan porsi dan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan, sehingga tidak ada lagi tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan komptensinya dan menyebabkan pendidikan tambal sulam terjadi serta menjadi cikal

bakal rendahnya mutu pendidikan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut sebagai pertimbangan untuk pemenuhan guru dalam kebutuhannya dengan kompetensi yang relevan (diharapkan penyesuaian yang dilakukan pada guru kelas) dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Kebutuhan Tenaga Guru SD Kecamatan Entikong

| No | Nama Sekolah | Kekurangan Guru (yang Dibutuhkan) | | | | | Jumlah |
|---------------|------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Kelas | Islam | Katolik | Protestan | Penjaskes | |
| 1 | SDN 01 Semanget | 4 | 1 | - | - | - | 5 |
| 2 | SDN 02 Panga | 4 | - | - | - | 1 | 5 |
| 3 | SDN 03 Sontas | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 4 | SDN 04 Puntitapau | 5 | - | 1 | - | 1 | 7 |
| 5 | SDN 05 Suruh Tembawang | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 6 | SDN 06 Merau | 3 | - | - | 1 | 1 | 5 |
| 7 | SDN 07 Mangkau | 7 | - | 1 | - | 1 | 9 |
| 8 | SDN 08 Nekan | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 9 | SDN 09 Serangkang | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | SDN 10 Pool | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 |
| 11 | SDN 11 Sekajang | 4 | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 12 | SDN 12 Entikong | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 13 | SDN 13 Puntikayan | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 |
| 14 | SDN 14 Badat | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 |
| 15 | SDN 15 Senutul | 4 | - | - | - | 1 | 5 |
| 16 | SDN 16 Gun Jemak | 6 | - | - | - | 1 | 7 |
| 17 | SDN 17 Pala Pasang | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 18 | MIS Istiqamah Entikong | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | 67 | 2 | 9 | 4 | 14 | 96 |

Kompetensi Pedagogik

Berdasarkan hasil temuan diperoleh bahwa kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sebesar 75% dengan kategori baik, hal tersebut ditunjukkan bahwa: guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi pembelajaran pada tiap mata pelajaran yang terlihat secara terpusat sebesar 74,65% dengan kategori baik, guru memberikan motivasi kepada siswa dalam proses pembelajaran sebesar 89,93% dengan

kategori sangat baik, guru membangun kreativitas siswa dalam proses pembelajaran sebesar 73,26% dengan kategori baik dan guru memberikan tugas individu yang berkaitan dengan mata pelajaran sebagai wahana evaluasi dalam mengukur keberhasilan pembelajaran sebesar 85% dengan kategori sangat baik.

Namun terkait dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, hal yang juga masih perlu diperhatikan dan dicermati adalah bahwa: guru perlu

memberikan tes intelegensi/kecerdasan pada awal proses pembelajaran, karena hal tersebut dapat menjadi wahana informasi kepada guru dalam mempersiapkan dan memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan porsi dan keadaan kemampuannya secara klasikal dan menyeluruh, karena hal tersebut ditunjukkan masih mencapai 60,76% (kurang baik) guru yang melaksanakan; dan pemberian tugas secara berkelompok yang masih cenderung jarang dilakukan, karena tentunya diharapkan dalam proses pembelajaran dimana siswa tidak hanya mampu bekerja secara individual, akan tetapi juga secara berkelompok sehingga terbangun kemampuan interaksi dan sosialnya dalam menyelesaikan tugas dengan sikap tanggung jawab bersama.

Kemudian, kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sebesar 69,27% dan masih tergolong kurang baik, hal tersebut ditunjukkan bahwa: guru belum optimal dalam mengarahkan siswa pada kebutuhan belajarnya, sehingga guru tidak mengetahui kebutuhan belajarnya sebagai dasar pijakan guru untuk mempersiapkan pembelajaran yang relevan dengan kondisi siswa (*usable*), keadaan ini terlihat sebesar 55,91% (kategori tidak baik) guru yang tidak mengetahui kebutuhan belajar yang diinginkan siswa, dan guru hanya cenderung memberikan evaluasi setelah pembelajaran diberikan (*posttest*), hal tersebut terlihat masih sebesar 66,32% guru yang memberikan *pretest*. Sehingga ketercapaian, peningkatan kemampuan yang terjadi setelah diberikannya *treatment* (pembelajaran) belum diketahui oleh guru. Namun, hal yang perlu dipertahankan dan kemudian dapat untuk lebih ditingkatkan adalah kemampuan guru dalam memberikan dorongan kepada siswa untuk mengenali lingkungan sebagai sumber belajar (kontekstual), karena hal tersebut ditunjukkan sebesar 73,61% dengan kategori baik guru melakukan aktivitas tersebut. Tentunya, dengan memprioritaskan beberapa hal yang masih kurang sebelumnya.

Selanjutnya, kemampuan guru memberikan evaluasi hasil belajar sebesar 79,65 dan tergolong baik. Diketahui bersama bahwa salah satu parameter untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran atau keberhasilan pelaksanaan pendidikan yang diraih adalah dengan mengetahui hasil belajar peserta didik melalui sarana evaluasi. Oleh sebab itu, kemampuan guru dalam memberikan evaluasi merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik agar menjadi dasar dalam melakukan perbaikan atau peningkatan mutu (kualitas) pendidikan. Hasil temuan menunjukkan bahwa guru melaksanakan ulangan harian setiap selesai kompetensi (per bab) sebesar 85,07% yang tergolong sangat baik, guru mengadakan UTS (ujian akhir semester) dan UAS (ujian akhir semester) sebesar 81,59% dan 94,79% yang tergolong sangat baik, dan tentunya kondisi demikian perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan menjadi sebuah rancangan pengelolaan (manajemen) pendidikan/pembelajaran oleh guru.

Akan tetapi hal yang juga perlu diperhatikan adalah masih perlunya guru mengadakan pengayaan dan tes remedial kepada siswa yang belum tuntas dalam penguasaan materinya, karena hal demikian masih kurang baik/rendahnya guru dalam memberikan hal tersebut, kondisi ini ditunjukkan sebesar 68,05% dan 68,75% guru yang melaksanakan. Tentunya dipandang perlu untuk ditingkatkan pemahaman (*space understanding*) siswa melalui pengayaan dan memberikan kesempatan perbaikan mereka dalam penguasaan materi sebagai sarana evaluasi/introspeksi diri siswa.

Tenaga guru selain mengajar harus mendidik juga. Oleh sebab itu pendidikan bukan hanya *transfer of knowledge* saja, akan tetapi lebih menekankan pada *transfer of value*. Kesempatan siswa memperoleh pendidikan, bukan hanya kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan saja, akan tetapi dimana siswa berkesempatan berkembang dan maju baik dari aspek kognitif, maupun afektif dan psikomotor

sebagai sarana melatih talenta yang ada pada dirinya. Oleh sebab itu guru juga dituntut mampu memberikan keterampilan tambahan (*additivity skill*) kepada peserta didik. Hasil temuan yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa guna mengembangkan bakatnya sebesar 58,33% dan pemberian bimbingan dan konseling yang hanya sebesar 55,55 % tentunya tergolong tidak baik dalam implementasi pelaksanaan kemampuan pengembangan peserta didik. Berkenaan dengan hal tersebut, tentunya perlu untuk ditingkatkan intensitas dalam pelaksanaan ekstrakurikuler serta bimbingan dan konseling kepada peserta didik untuk membantu menunjang perkembangannya.

Kompetensi Kepribadian

Ungkapan klasik mengatakan bahwa “*segala sesuatunya bergantung pada pribadi masing-masing*”. Dalam konteks tugas guru, kompetensi pedagogik, profesional dan sosial yang dimiliki seorang guru pada dasarnya akan bersumber dan bergantung pada pribadi guru itu sendiri. Dalam melaksanakan proses pembelajaran dan berinteraksi dengan siswa akan banyak ditentukan oleh karakteristik kepribadian guru yang bersangkutan. Memiliki kepribadian yang sehat dan utuh, dengan karakteristik sebagaimana diisyaratkan dalam rumusan kompetensi kepribadian yang dapat dipandang sebagai titik tolak bagi seseorang untuk menjadi guru yang sukses.

Guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mengembangkan kepribadian siswa atau sekarang lebih dikenal dengan membangun karakter (*character building*) siswa. Penguasaan kompetensi kepribadian yang memadai dari seorang guru akan sangat membantu upaya pengembangan karakter siswa. Dengan menampilkan sebagai sosok yang bisa di-gugu (dipercaya) dan ditiru, secara psikologis anak cenderung akan merasa yakin dengan apa yang sedang diajarkan gurunya. Misalkan, ketika guru hendak membelajarkan tentang kasih sayang kepada siswanya, tetapi di sisi lain secara

disadari atau biasanya tanpa disadari, gurunya sendiri malah cenderung bersikap tidak senonoh, mudah marah dan sering bertindak kasar, maka yang akan melekat pada siswanya bukanlah sikap kasih sayang, melainkan sikap tidak senonoh itulah yang lebih berkesan dan tertanam dalam sistem pikiran dan keyakinan siswanya. Seperti sebuah adagium yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara “*jika guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari*”.

Bukti-bukti ilmiah juga menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru berpengaruh terhadap perkembangan belajar dan kepribadian siswa (Sudrajat, 2013):

Studi kuantitatif yang dilakukan Pangky Irawan (2010) membuktikan bahwa kompetensi kepribadian guru memiliki hubungan erat dan signifikan dengan motivasi berprestasi siswa. Sementara studi kualitatif yang dilakukan Sri Rahayu (2008) menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru memiliki kontribusi terhadap kondisi moral siswa. Hasil studi lain membuktikan tampilan kepribadian guru akan lebih banyak mempengaruhi minat dan antusiasme anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran (Iis Holiday, 2010).

Berkenaan dengan hal tersebut tentunya dipandang perlu untuk dipertahankan dan kemudian dapat lebih ditingkatkan kompetensi kepribadian guru dalam memberikan contoh perilaku yang baik kepada siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, bersikap arif ketika menghadapi siswa yang bermasalah, mampu mengontrol emosi, bersikap objektif, adil dan menginspirasi melalui semangat mengajar, terbuka dan kreatif sebagai percontohan yang layak dan ditiru, hal tersebut ditunjukkan berdasarkan hasil temuan terhadap rekapitulasi beberapa komponen yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian guru yang dinilai sangat baik dengan perolehan bobot sebesar 89,41%.

Selain itu, kepribadian guru juga terlihat dari kedisiplinan yang juga merupakan salah satu kunci selarasnya

kepribadian guru untuk membangun dan menciptakan insan yang berakhlak mulia. Untuk mencapai suatu keberhasilan seseorang harus mulai hidup disiplin, kedisiplinan harus dimulai dari kecil, agar di saat dewasa nanti seseorang tersebut terbiasa dengan kedisiplinan yang dapat mengantarkannya meraih keberhasilan. Kedisiplinan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, kompetensi kepribadian guru yang sangat baik (86,85%) dapat dijadikan sebuah sarana dalam merealisasikan salah satu tujuan pendidikan, pada aspek ini tercermin bahwa ketepatan guru pada waktu memulai dan mengakhiri jam pelajaran, memberikan aturan yang jelas dan tegas serta penanaman sikap yang baik terhadap pengetahuan dan pekerjaan. Karena **guru merupakan teladan bagi para murid**, langkah awal untuk mendisiplinkan para murid di sekolah adalah memberikan contoh yang baik jika

memang mereka belum menyadari dan memahami peraturan di sekolah, tentunya ini mesti dimulai oleh guru terlebih dahulu agar siswa berlaku yang demikian. Tanpa kedisiplinan guru, kualitas pendidikan di sekolah akan menurun, hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang didapat oleh murid.

Kompetensi Profesional

Siapa pun sepakat untuk menempatkan kualitas sebagai tujuan utama dari *output* dari pendidikan. Kesepakatan tersebut tentunya memiliki ketentuan dan syarat agar apa yang menjadi tujuan dari pendidikan dapat terealisasi, diantaranya adalah profesionalisme tidak terlepas dari sarana pra-sarana yang mendukung, penghargaan dan kesejahteraan yang ideal dan pendukung-pendukung yang sinergis dan mumpuni. Faktor yang juga tidak terlepas dari intervensi pemerintah adalah menyediakan dan memfasilitasi sarana pra-sarana pendukung (gambar 4).



Gambar 4. Ruang Guru dan Jalur Transportasi Darat

Dalam pendidikan dibutuhkan guru yang mau meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan jaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang cerdas dan berdedikasi tinggi, yaitu guru yang mampu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu sesuai kurikulum yang berlaku, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran dan kemudian melaksanakan tindak lanjut, serta

pandai memilih materi yang harus ditekankan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

Berbicara tentang guru selalu terkait dengan pekerjaan mengajar, dan mendidik yang orientasinya membawa peserta didik mencapai kematangan berpikir dan mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Persyaratan-persyaratan mutlak dalam penyelenggaraan pendidikan selain persyaratan fisik, tentunya kompetensi profesional yang ditandai dengan “*informed*

responsive”, memiliki kapasitas kecerdasan serta sifat-sifat edukasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan laju pertumbuhan dan perkembangan dunia pendidikan, kualifikasi akademik guru perlu diarahkan dan ditingkatkan agar prinsip linieritas pendidikan dapat dipenuhi, dengan demikian proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Peran guru tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu (*space and time*) berubah kearah “*the word is my class*” karena seluruh informasi digunakan dalam proses komunikatif pembelajaran sehingga peran guru tidak lagi sebagai “*infomeddiary*”. (Tuty dan Mardiana: 2012)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, tentunya profesionalisme merupakan indikator kunci untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang ditenggarai oleh guru sebagai nahkoda pendidikan. Berdasarkan hasil temuan diperoleh bahwa kemampuan guru dalam penguasaan dan pemahaman materi adalah sangat baik dengan prosentase sebesar 85,18%, hal tersebut ditunjukkan bahwa: penguasaan materi mata pelajaran yang diampu oleh guru sebesar 90,63%, guru mengembangkan materi pelajaran dan bahan pengayaan sebesar 82,63% dan 82,23% dengan kategori sangat baik.

Kemudian, kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran dan pengelolaan kelas dengan raihan prosentase 84,11% dan dikategorikan sangat baik, tentunya hal tersebut perlu dipertahankan serta ditingkatkan, adapun kondisi tersebut ditunjukkan bahwa: kemampuan guru dalam menyampaikan materi secara hirarkis (urutan) sesuai dengan mata pelajaran yang diampu adalah sebesar 91,32% dengan kategori sangat baik, guru mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif di dalam kelas pada saat proses pembelajaran sebesar 90,63% dengan kategori sangat baik, guru mampu membagi waktu sesuai dengan kondisi untuk pelaksanaan pembelajaran (awal, inti dan akhir) sebesar 81,25% dengan kategori sangat baik. Kemudian juga yang dinilai sangat baik terkait dengan kompetensi

profesionalisme guru dalam hal mengelola proses pembelajaran dan kelas adalah: guru bersikap tidak monoton ketika menyampaikan materi (82,63%), menggunakan bahasa Indonesia yang baik (92,71%) sehingga jelas dan baik didengar oleh siswa (90,27%) serta memberikan kejelasan dalam menyampaikan langkah kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas yang mesti diselesaikan (85,42%). Guru menggunakan metode mengajar yang bervariasi dalam proses pembelajaran sebesar 76,04% dengan kategori baik.

Namun yang perlu juga menjadi perhatian oleh guru terkait dengan kompetensi profesional adalah bahwa guru masih belum optimal dalam mendayagunakan media dan sumber belajar yang sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan, hal tersebut terlihat bahwa baru 66,66% dengan kategori kurang baik sehingga pada bagian ini guru masih kurang mampu mengarahkan siswa pada kebutuhan belajarnya, padahal kita ketahui bahwasanya dunia siswa sangat seras dengan sesuatu yang menarik sehingga membuat peserta didik tertarik untuk terus aktif mengikuti dan melaksanakan pembelajaran. Seiring dengan hal tersebut, tentunya dengan memprioritaskan beberapa hal yang masih kurang mesti adanya perbaikan dan peningkatan kompetensi profesionalisme guru dalam ranah kemampuan mengelola (pembelajaran dan kelas).

Kompetensi Sosial

Inti dari kehidupan bermasyarakat adalah dimana seseorang mampu dan bermanfaat kepada orang lain. Oleh sebab itulah pada hakekatnya manusia disebut makhluk sosial (*human social*), dikarenakan manusia tidak dapat berdiri sendiri, manusia saling membutuhkan dan ketergantungan antar satu dan yang lainnya. Diantara beberapa hal tersebut di atas, pendidikan merangkap pada bagian ini, tuntutan guru untuk memiliki kompetensi sosial adalah agar mampu mendidik generasi penerus sebagai generasi yang peduli, generasi yang bermanfaat, generasi yang memahami

hakekat kehidupan bermasyarakat sehingga tidak hanya melahirkan generasi cerdas, akan tetapi juga melahirkan generasi benar.

Pada ranah ini menegaskan bahwa manusia dituntut mampu berhubungan baik sesama manusia dan alam semesta, analogi standar menyatakan bahwa “senyum saja membutuhkan orang”, sehingga sangat dibutuhkan kemampuan guru untuk mampu membangun nilai-nilai sosial pada jiwa peserta didik yang secara tegas dan jelas merupakan salah satu tujuan nasional pendidikan di Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan hasil temuan diperoleh bahwa kemampuan guru dalam membina komunikasi dan kerjasama adalah sangat baik dengan prosentase sebesar 80,09%, hal tersebut ditunjukkan bahwa: guru melakukan komunikasi dengan siswa secara baik untuk keberhasilan proses pembelajaran sebesar 90,97%, dan guru membina kerjasama dengan siswa untuk mencapai keberhasilan belajar yang diharapkan sebesar 86,81%. Akan tetapi, yang turut menjadi perhatian oleh guru dalam membangun komunikasi dan kerjasama terhadap siswa tidak hanya berhubungan langsung dengan siswa, karena bagian dari keberhasilan pembelajaran atau siswa juga ditentukan dari dukungan dan perhatian dari pihak orang tua maupun keluarga. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan intensitas guru dalam membina komunikasi dengan orang tua siswa secara baik untuk memantau keberhasilan/kemampuan siswa dalam belajar sehingga visi antara guru dan orang tua dapat selaras untuk mencapai

tujuan pendidikan, karena berdasarkan hasil temuan komunikasi yang dijalin sebesar 62,50% dengan kategori kurang baik.

Kompetensi sosial yang berhubungan dengan pengetahuan agama, budaya dan adat istiadat yang diterapkan sebesar 71,87% dengan kategori baik. Hal tersebut ditunjukkan bahwa: memberikan pengetahuan tentang adat istiadat, sosial maupun agama adalah sebesar 76,38% dengan kategori baik. Namun pengetahuan yang berkaitan dengan budaya dan tradisi pada siswa sebesar 67,36% dengan kategori kurang baik, tentunya hal tersebut perlu untuk ditingkatkan, karena mengingat pendekatan pembelajaran yang diharapkan adalah pendekatan yang mampu mengakrabkan siswa dengan lingkungannya atau yang biasa disebut kontekstual, sehingga selain mengembangkan sikap cinta tanah air, siswa juga memahami pentingnya pelajaran yang diperoleh karena erat dengan kehidupan atau keseharian mereka.

Media Pembelajaran

Salah satu dari delapan standar nasional pendidikan yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan adalah tersedianya sarana prasarana yang relevan, layak dan lengkap. Oleh sebab itu media pembelajaran adalah bagian dari hal tersebut. Namun kenyataan di lapangan belumlah sesuai dengan yang diharapkan, berdasarkan hasil temuan penelitian diperoleh bahwa ketersediaan media dalam pembelajaran masih tidak lengkap atau sebesar 43,32%. Hal tersebut terlihat bahwa pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Ketersediaan Media dalam Pembelajaran

| No | Bagian | Ketercapaian | Keterangan |
|----|--|--------------|---------------|
| 1 | Kelengkapan buku pegangan/pokok mata pelajaran adaptif (agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Penjaskes) | 56,25 % | Tidak Lengkap |
| 2 | Kelengkapan buku pegangan/pokok mata pelajaran normatif (Matematika, Bahasa Inggris, Kewirausahaan, Fisika, Kimia) | 46,87% | Tidak Lengkap |

| | | | |
|---|---|--------|---------------|
| 3 | Kelengkapan media masa dan majalah sebagai pendukung pelajaran tertentu | 29,52% | Tidak Lengkap |
| 4 | Kelengkapan media pembelajaran | 40,63% | Tidak Lengkap |

(Samion dan Darma, 2014)

Kenyataan di atas (tabel 6) selaras dengan kesesuaian guru dalam menggunakan media yang digunakan, hal tersebut terlihat sebesar 44,96% guru tidak menggunakan media sesuai dengan kemampuannya, tidak bersikap adaptif dengan perkembangan teknologi, minimnya dalam penggunaan media peraga, elektronik serta alat-alat yang produktif untuk menunjang proses pembelajaran. Oleh sebab itu pengetahuan dan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran tentunya perlu menjadi sorotan yang penting sebagai penunjang peningkatan kualitas pembelajaran.

Berikut berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan sebagai wahana informasi diperoleh **Faktor pendukung:** 1) Adanya kerjasama guru dan masyarakat, 2) Lingkungan masih hutan dan jauh dari keramaian sehingga bisa tenang dalam melaksanakan pendidikan, 3) Transportasi yang memadai/lancar, 4) Ruang kelas yang kondusif, adanya buku penunjang. **Faktor kendala:** 1) Relevansi tenaga guru yang belum memadai, baik secara kuantitas maupun kompetensi yang sesuai dengan disiplin ilmunya. 2) Tenaga guru, ruangan, literatur pembelajaran, media pembelajaran (perpustakaan), serta sarana dan prasarana yang masih belum representatif, kemudian dukungan dari masyarakat maupun orang tua yang masih belum optimal. 3) Transportasi ke beberapa wilayah (kecamatan) masih terbatas, jarak tempuhnya jauh dan masih melalui jalur sungai (arung jeram) seperti desa suruh tembawang, dan sebagainya. 4) Banyak tenaga pendidik yang masih belum bisa mengoperasikan (menggunakan) media pembelajaran (gadget). 5) Ada di beberapa sekolah yang masih belum tersedianya listrik dan jaringan komunikasi yang memadai sehingga cukup menghambat dalam

penyampaian informasi dari kecamatan ke desa, dan pelaksanaan proses pembelajaran.

Selanjutnya pengelolaan dan pelayanan dalam pelaksanaan program pendidikan di Kecamatan Entikong yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Entikong) selama ini: 1) Masih terbatasnya komunikasi dalam memberikan informasi (koordinasi) dari dinas kecamatan dengan tenaga pendidik. 2) Ada beberapa sekolah dimana pengawas TK-SD jarang ke lokasi sekolah untuk mengawasi kinerja guru dan sekolah di lapangan. 3) Masih minimnya pembinaan dari dinas pendidikan, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan sebagainya.

SIMPULAN

Selaras dengan rumusan dan tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, diperoleh simpulan bahwa: 1) Relevansi guru di daerah perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau masih belum proporsional, yang dalam hal ini terlihat bahwa masih ada diantaranya guru mata pelajaran tertentu yang tidak sesuai dengan kompetensi/disiplin ilmunya. 2) Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sebesar 75% dan kemampuan guru memberikan evaluasi hasil belajar sebesar 79,65 dengan kategori baik. Namun terkait dengan kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran tergolong kurang baik dengan raihan prosentase sebesar 60,76% dan 69,27%. Kemudian, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa guna mengembangkan bakatnya dan pemberian bimbingan dan konseling adalah tidak baik hal tersebut terlihat dengan prosentase yang terlaksana sebesar 58,33% dan 55,55 %; Kompetensi kepribadian guru dinilai sangat baik dengan raihan bobot sebesar 89,41%, dan kemampuan guru dalam

mengembangkan kedisiplinan peserta didik adalah sangat baik (86,85%). Pada kompetensi profesional, kemampuan guru dalam penguasaan dan pemahaman materi adalah sangat baik dengan prosentase sebesar 85,18%, dan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran dan pengelolaan kelas dengan raihian prosentase 84,11% dan dikategorikan sangat baik. Namun hal yang perlu juga menjadi perhatian oleh guru terkait dengan kompetensi profesional adalah bahwa guru masih belum optimal dalam mendayagunakan media dan sumber belajar yang sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan, hal tersebut terlihat bahwa baru 66,66% dengan kategori kurang baik. terkait dengan kompetensi sosial kemampuan guru dalam membina komunikasi dan kerjasama adalah sangat baik dengan prosentase sebesar 80,09%. Akan tetapi, yang turut menjadi perhatian oleh guru dalam membangun komunikasi dan kerjasama terhadap siswa diperoleh 62,50% dengan kategori kurang baik. Kemudian, kompetensi sosial yang berhubungan dengan pengetahuan agama, budaya dan adat istiadat yang diterapkan sebesar 71,87% dengan kategori baik. Namun pengetahuan yang berkaitan dengan budaya dan tradisi pada siswa sebesar 67,36% dengan kategori kurang baik.

3) Ketersediaan media dalam pembelajaran masih tidak lengkap atau sebesar 43,32%.

SARAN

Untuk meraih peningkatan kualitas pendidikan di daerah perbatasan, sinergi kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh

pemerintah pusat dan daerah perlu untuk dilakukan secara lebih terarah, karena pencapaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari upaya dan pencapaian yang dilakukan daerah. Selanjutnya, beberapa langkah alternatif yang diperlukan oleh daerah untuk mendukung pembangunan nasional telah dijabarkan dalam tulisan ini. Langkah-langkah tersebut dapat dijadikan sebagai referensi oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memberikan kontribusi dan merumuskan strategi pembangunan daerah, khususnya di daerah perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Sehingga ke depan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam mencapai target dan sasaran pembangunan nasional, sesuai dengan tema pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut, masing-masing pelaksana (Cabdikpora, Sekolah, dan Guru) tentunya dapat memilih langkah-langkah prioritas yang perlu segera didahulukan, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian IKIP PGRI Pontianak yang memberikan bantuan moril dan finansial terhadap pelaksanaan penelitian serta Cabang Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang berkenan memberikan informasi dan bekerja sama secara pro aktif untuk pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aelenei, V. 2001. *"Dreptul frontierei de stat"*, Bucharest, Vol. 1, Pro Transilvania Publishing House, p. 112.
- Akaha, T. and Vassilieva, A. (eds). 2005. *Crossing National Borders: Human*

Migration Issues in Northeast Asia. Japan: United Nations University Press.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 2009. *Profil Daerah Kabupaten*

- Sanggau Tahun 2009*. Bappeda: Kabupaten Sanggau.
- Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. 2006. *Pengelolaan Kawasan Perbatasan*. BP2KKP: Kalbar.
- Budiyono. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surakarta: UNS Press.
- Guo, R. 2005. *Cross Border Resource Management, Theory and Practice*. Amsterdam: Elsevier
- INPRES No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- Prescott, J. R. V. 1987. *Political Frontiers and Boundaries*. London: Allen & Unwin.
- Samion dan Darma, Y. 2014. *Kebutuhan dan Kompetensi Guru di Daerah Kabupaten Bengkayang*. Penelitian Guru Besar: IKIP PGRI Pontianak.
- Sudrajad, A., 2013. *Arti Penting Kompetensi Kepribadian Guru*. <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2012/10/22/kompetensi-kepribadian-guru/> Diakses tanggal 28 Desember 2013
- Tuty, F dan Mardiana. 2012. *Guru Profesioanal dan Relevansi Pendidikan*. Palembang: IKIP PGRI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Van Well, L. 2006. *Cross-Border Typologies in the Enlargement Area. Results from the ESPON 1.1.3 Report. Enlargement of the European Union and its Polycentric Spatial Structure*. Royal Institute of Technology.